

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 174/ITJ.1/TU.140/VII/2026

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur I
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Capaian Kinerja Inspektorat I Periode Triwulan II Tahun 2026
Tanggal : 15 Juli 2026

Bersama ini kami melaporkan kepada Bapak, bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memandatkan untuk dilakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala (Triwulan).

Sehubungan hal tersebut, Inspektorat I telah melakukan pengukuran kinerja periode Triwulan II Tahun 2026 melalui aplikasi pengelolaan kinerja KKP (<https://kinerjaku.kkp.go.id/>). Pengukuran dilakukan terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja dan diperoleh **Nilai Kinerja Organisasi (NKO)** sebesar **109,69%** atau kategori “**Baik**”. Uraian terhadap hasil pengukuran masing-masing indikator kinerja secara rinci kami sampaikan melalui Laporan Kinerja Inspektorat I sebagaimana terlampir.

Demikian laporan kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdul Mubin

Tembusan:
Sekretaris Inspektorat Jenderal

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT I INSPEKTORAT JENDERAL KKP PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2026

BAB I. PENDAHULUAN

Berdasarkan amanah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, diketahui bahwa Inspektorat I memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Pusat Data dan Informasi serta Pusat Kebijakan Strategis dan Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Pengelolaan Kelautan, serta Pusat Data dan Informasi. Sehubungan hal tersebut, Inspektorat I mempunyai peran strategis dalam mengawal program/kegiatan mitra kerja dalam mendukung pencapaian terhadap program 5 kebijakan ekonomi biru yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, 3 dari 5 kebijakan tersebut merupakan program/kegiatan yang dijalankan oleh mitra kerja Inspektorat I yaitu pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Adapun program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab mitra kerja Inspektorat I adalah program/kegiatan perluasan kawasan konservasi laut, pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta penanganan sampah plastik di laut melalui Laut Sehat Bebas Sampah (SEBASAH). Selain hal tersebut, Inspektorat I juga melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal KKP yang memiliki tugas fungsi sebagai dukungan manajerial mulai dari perencanaan hingga pelaporan, pelaksanaan pengawasan terhadap program nasional yaitu swasembada garam nasional.

Dalam rangka mengawal program/kegiatan mitra kerja, Inspektorat I menghadapi beberapa tantangan (*strategic issues*) diantaranya adalah: 1) adanya perubahan kebijakan terkait efisiensi anggaran, sehingga hasil pengawasan belum memberikan jaminan secara maksimal berdasarkan pelaksanaan program/kegiatan di lapangan; 2) keterbatasan SDM Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sebagai pelaksana yang mengawal setiap pelaksanaan program/kegiatan mitra kerja. Menghadapi tantangan tersebut, Inspektorat I selalu berupaya untuk memberikan pendampingan/pengawalan semaksimal mungkin terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, mulai dengan menyusun program pengawasan melalui pendekatan penilaian risiko atas program/kegiatan yang telah ditetapkan, selain hal tersebut dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat I telah

memanfaatkan peran teknologi informasi dengan melakukan pengawasan secara online terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada mitra kerja.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Inspektorat I sebagai *quality assurance* maupun *consulting partner* terhadap mitra kerjanya perlu menyusun rencana kinerja dalam rangka mengawal program/kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kementerian. Dalam hal ini, Inspektorat I merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal KKP telah menetapkan rencana kinerja yang dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai target strategis dan operasional antara Inspektur Jenderal dengan Inspektur I sebagai pimpinan unit kerja. Adapun tujuan ditetapkannya PK tersebut adalah sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai alat monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan kinerja bagi penerima amanah.

Kinerja Tahun 2026 lingkup Inspektorat I, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja dengan penetapan target pada masing-masing indikator kinerja dimaksud sebagaimana pada tabel berikut.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
1	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat I	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	≤ 0,5
		2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat I (%)	86,5
		3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I (%)	86
		4	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat I (Rekomendasi)	4
2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat I	5	Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat I (Nilai)	85,5
		6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat I (%)	82
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat I (%)	100

Berdasarkan PK tersebut, Inspektorat I mempunyai kewajiban untuk melakukan pengukuran secara periodik terhadap target pada masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan serta melaporkannya kepada pimpinan unit kerja Eselon I. Selain hal itu, Inspektorat I juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian atas Rencana Aksi

(Renaksi) sebagai bentuk strategi dalam rangka mencapai target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja melalui aplikasi pengelolaan kinerja pada laman <https://kinerjaku.kkp.go.id/> diketahui bahwa Inspektorat I pada periode Triwulan II Tahun 2026 memperoleh **Nilai Kinerja Organisasi (NKO)** sebesar **109,69%** atau kategori **“Baik”**. Nilai tersebut diperoleh dari nilai Sasaran Kinerja sebagai berikut:

- 1) SK.01 “Pengawasan Intern Yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah terhadap Kinerja Mitra Inspektorat I” dengan capaian 113,69%;
- 2) SK.02 “Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat I” dengan capaian 105,68%.

Capaian Sasaran Kinerja tersebut diperoleh dari hasil pengukuran terhadap 5 (lima) Indikator Kinerja yang menjadi target pengukuran periode Triwulan II Tahun 2026. Adapun penjelasan terhadap hasil pengukuran indikator kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1) IKSK.01.1 Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%).

Pengukuran pada indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah nilai temuan keuangan (nilai Tuntutan Ganti Rugi) dari hasil pemeriksaan BPK pada Laporan Keuangan Unit Eselon I (mitra) Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I tahun 2025 (mitra).

(-----tidak dilakukan pengukuran dan akan dilakukan pengukuran pada periode Tahunan (pada Triwulan III) -----).

- 2) IKSK.01.2 Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat I (%).

Persentase implementasi Reformasi Birokrasi (RB) merupakan indikator yang mengukur tingkat implementasi reformasi birokrasi lingkup Unit Eselon I berdasarkan persentase realisasi rencana aksi RB Unit Eselon I yang telah ditetapkan.

(-----tidak dilakukan pengukuran dan akan dilakukan pengukuran pada periode Tahunan (pada Triwulan IV) -----).

- 3) IKSK.01.3 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I (%).

Pengukuran capaian Indikator Kinerja ini diperoleh dengan membandingkan antara rekomendasi yang telah ditindaklanjuti secara tuntas terhadap jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang terbit pada periode periode 1 Oktober 2025 s.d. 31 Desember 2026 (Triwulan IV 2025), adapun hasil pengukuran terhadap persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas sebesar **94,15% (tuntas 161 dari 171 rekomendasi)** atau nilai capaiannya sebesar **109,48%**. Nilai persentase jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 86,00%, dengan uraian:

- a. Capaian perkembangan tindak lanjut LHP lingkup Sekretariat Jenderal KKP yaitu dari 22 LHP dengan 43 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti seluruhnya atau sebanyak 43 rekomendasi telah berstatus TUNTAS dengan **capaiannya sebesar 100%**;
- b. Capaian perkembangan tindak lanjut LHP lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yaitu dari 51 LHP dengan 115 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 105 rekomendasi dengan status TUNTAS atau **capaiannya sebesar 91,30%**, dan masih terdapat sisa sebanyak 10 (sepuluh) rekomendasi belum dinyatakan tuntas;
- c. Capaian perkembangan tindak lanjut LHP lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yaitu dari 8 LHP dengan 13 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti seluruhnya atau sebanyak 13 rekomendasi dengan status TUNTAS atau **capaiannya sebesar 100%**.

Capaian ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (Triwulan I Tahun 2026) yaitu sebesar 104,16% dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode Triwulan II Tahun 2025 yaitu sebesar 116,05%, data perkembangan capaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Triwulan II Tahun 2025			Triwulan I Tahun 2026			Triwulan II Tahun 2026		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I	85%	98,64%	116,05%	86%	89,58%	104,16%	86%	94,15%	109,48%

Penurunan capaian pada Indikator Kinerja ini disebabkan adanya kenaikan target di Tahun 2026 menjadi 86% jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 yaitu 85%. Selain hal tersebut, terdapat rekomendasi hasil pengawasan periode Triwulan IV

Tahun 2025 yang memerlukan waktu lebih lama dalam menindaklanjutinya sebagai dampak pemisahan organisasi Unit Kerja Eselon I yaitu Ditjen PKRL menjadi Ditjen PK dan Ditjen PRL.

Sebagai upaya percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal, Inspektorat I telah melakukan kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pada mitra kerja secara berkala (bulanan) melebihi dari target yang ditetapkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yaitu secara Triwulanan. Selain hal tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan aplikasi tindak lanjut (SIDAK) yang membantu menyediakan data hasil pengawasan serta upaya penyelesaian/tindak lanjut yang telah dilakukan mitra kerja secara update/real time.

4) IKS.01.4 Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (Rekomendasi).

Rekomendasi kebijakan merupakan masukan/saran dari hasil kajian Itjen yang diberikan kepada mitra kerja dalam rangka penyempurnaan proses penyusunan/pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar dalam pelaksanaan suatu program/kegiatan pada tingkat kementerian/eselon I/eselon II.

Hasil pengukuran pada indikator kinerja Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra adalah terealisasi sebesar **12 (dua belas) rekomendasi dari 2 (dua) rekomendasi** yang menjadi target pada Triwulan II Tahun 2026 atau capaiannya sebesar **120% (capaian maksimal IKU)** melampaui target yang ditetapkan. Adapun rekomendasi sebagai perbaikan kebijakan yang telah disampaikan adalah:

- a. Masukan terhadap Draf Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri Kapal Pembersih Sampah Mobula 10 dari The SeaCleaners (TSC) Swiss, melalui Nota Dinas Nomor 41/ITJ.1/TU.210/II/2026 dari Inspektur I yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- b. Masukan atas Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, melalui Nota Dinas Nomor 8/ITJ.1/HK.160/II/2026 dari Inspektur I yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum;
- c. Masukan atas Rancangan Keputusan Menteri KP tentang Penetapan Lokasi Karbon Biru di Provinsi Jawa Tengah, melalui Nota Dinas Nomor 15/ITJ.1/TU.210/II/2026 dari Inspektur I yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum;
- d. Masukan atas Rancangan Kepmen KP tentang Tim Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK), dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Sektor

- Kelautan dan Perikanan, melalui Nota Dinas Nomor 93/ITJ.1/TU.210/IV/2026 dari Inspektur I yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum;
- e. Masukan atas Rancangan Kepmen KP tentang Pedoman Pengukuran Karbon Biru pada Ekosistem Padang Lamun, melalui Nota Dinas Nomor 2/ITJ/TU.210/I/2026 dari Inspektur Jenderal yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal;
 - f. Telaah atas Usulan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada KKP atas Penataan Ruang Laut pada Wilayah Tertentu di Perairan, melalui Nota Dinas Nomor 39/ITJ.1/PL.440/II/2026 dari Inspektur I yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum;
 - g. Masukan atas Rancangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan PT. Garam Tentang Uji Coba Produksi Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui Nota Dinas Nomor 75/ITJ/TU.210/VI/2026 dari Inspektur Jenderal yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan;
 - h. Masukan atas Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Uji Tuntas Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, melalui Nota Dinas Nomor 135/ITJ.1/TU.210/V/2026 dari Inspektur I yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum;
 - i. Masukan atas Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Banding Administratif atas Penetapan Denda Administratif PT Surya Sarana Marina, melalui Nota Dinas Nomor 133/ITJ.1/TU.210/V/2026 dari Inspektur I yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum;
 - j. Masukan atas Rancangan Perubahan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui Nota Dinas Nomor B.100/ITJ/HK.140/V/2026 dari Inspektur Jenderal KKP yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
 - k. Masukan atas Draf Permohonan Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Terkait Ekspor Hasil Sedimentasi di Laut, melalui Nota Dinas Nomor 114/ITJ.1/TU.210/IV/2026 dari Inspektur I yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
 - l. Masukan atas Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Percepatan Swasembada Garam Nasional, melalui Nota Dinas Nomor

113/ITJ.1/TU.210/IV/2026 dari Inspektur I yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Perkembangan capaian kinerja pemberian rekomendasi sebagai perbaikan kinerja mitra mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode Triwulan II Tahun 2025, sedangkan capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan I Tahun 2026 karena tidak dilakukan pengukuran. Secara detail data perkembangan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Triwulan II Tahun 2025		Triwulan I Tahun 2026		Triwulan II Tahun 2026			Tahun 2026	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi
Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat I (Rekomendasi)	3	120%	-	-	2	12	120%	4	12

Dari data tersebut diketahui bahwa persentase capaian jika dibandingkan dengan periode Triwulan II Tahun 2025 **STABIL** serta capaian kinerja pada indikator kinerja ini telah terealisasi 12 dari 4 target sampai akhir Tahun 2026 atau sebesar **120% (capaian maksimal IKU)**. Stabilitasnya capaian pada indikator kinerja pemberian rekomendasi sebagai perbaikan kinerja mitra disebabkan adanya peningkatan peran Inspektorat I sebagai *consulting partner* dalam rangka memberikan masukan atas pelaksanaan program/kegiatan mitra kerja mulai dari proses perencanaan hingga pemanfaatan hasil pelaksanaan program/kegiatan dimaksud.

5) IKSK.02.1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat I (Nilai)

Telaah sejawat adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Inspektorat lain lingkup Itjen KKP. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit sesuai dengan standar pengawasan intern.

Pengukuran diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat IV terhadap Inspektorat I melalui Surat Tugas Nomor B.285/ITJ.4/KP.440/IV/2026 terhadap komponen standar atribut dan standar pelaksanaan untuk mendapatkan keyakinan bahwa Inspektorat I telah melaksanakan audit sesuai dengan standar audit Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), dengan hasil diperoleh sebesar **91,72** atau dengan simpulan “sangat baik”, hal ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan intern yang dilakukan dalam hal ini tata kelola, praktik profesional dan komunikasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat I telah dirancang secara memadai dan dijalankan secara efektif sesuai standar audit. Hasil telaah sejawat internal dari Inspektorat V melebihi dari target yang telah ditetapkan

yaitu sebesar 85,5 atau capaian sebesar **107,27%**. Nilai hasil telaah sejawat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode Triwulan II Tahun 2026, sedangkan capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan I Tahun 2026 karena tidak dilakukan pengukuran. Secara detail data perkembangan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Triwulan II Tahun 2025		Triwulan I Tahun 2026		Triwulan II Tahun 2025			Tahun 2025	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi
Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat I (Nilai)	94,51	111,19 %	-	-	85,5	91,72	107,27%	85,5	91,72

Berdasarkan data di atas diperoleh capaian pada indikator kinerja ini telah melampaui target yang ditetapkan, adapun beberapa hal yang telah dilakukan Inspektorat I dalam mencapai hasil telaah sejawat internal yang “sangat baik” melalui:

- a. Pemantauan terhadap pemenuhan Kendali Mutu Pengawasan;
 - b. Pelaksanaan reviu berjenjang dalam hal penugasan pengawasan;
 - c. Peningkatan kompetensi Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - d. Pendokumentasian terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- 6) IKSK.02.2 Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat I (%).

Merupakan sebuah ukuran dari implementasi pemanfaatan sistem informasi dalam membantu dan mendukung tugas pelaksanaan pengawasan intern oleh unit kerja lingkup Itjen KKP.

Pengukuran indikator kinerja ini diperoleh dari data yang disampaikan oleh Tim Kerja Sistem Informasi Pengawasan (SIP) Sekretariat Itjen atas kepatuhan upload laporan hasil pengawasan terhadap mitra kerja melalui aplikasi Audit Manajemen Sistem (AMS) dengan hasil pengukuran sebesar **89,36%**. Hasil ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 82% atau capaiannya sebesar 108,98%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang dilakukan pengukuran pada periode Triwulan II Tahun 2025, sehingga nilai capaian tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu Triwulan II Tahun 2024 maupun Triwulan I Tahun 2025.

Perkembangan capaian kinerja Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat I mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode Triwulan II Tahun 2025, sedangkan capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan I Tahun 2026 karena tidak dilakukan pengukuran. Secara detail data perkembangan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Triwulan II Tahun 2025		Triwulan I Tahun 2026		Triwulan II Tahun 2026			Tahun 2026	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi
Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat I (%)	97,92%	122,40%	-	-	82%	89,36%	108,98%	82%	108,98%

Capaian kinerja yang melebihi target IKU, diperoleh melalui upaya yang telah dilakukan melalui pemantauan terhadap kepatuhan upload laporan hasil pengawasan melalui aplikasi AMS (ams.kkp.go.id).

7) IKS.02.3 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat I (%).

Suatu ukuran yang menggambarkan pelaksanaan pengelolaan kinerja dan anggaran lingkup Inspektorat dijalankan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengukuran pada indikator kinerja ini diperoleh dari tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan kinerja dan anggaran melalui pemenuhan terhadap:

- Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026;
- Pengisian data capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP (kinerjaku.kkp.go.id);
- Monitoring dan evaluasi Renaksi pencapaian target kinerja Triwulan I Tahun 2026;
- Tersedianya LPJ Keuangan Triwulan II (April – Juni) Tahun 2026;
- Rekapitulasi realisasi PKPT lingkup Inspektorat periode Triwulan II.

Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh bahwa capaian kinerja sebesar 100% atau seluruh dokumen di atas telah dipenuhi oleh Inspektorat I secara tertib. Adapun perkembangan capaian kinerja jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu Triwulan II Tahun 2025 serta Triwulan I Tahun 2026 telah sesuai dengan target yang ditetapkan (**capaian kinerja STABIL**).

Indikator Kinerja	Triwulan II Tahun 2025			Triwulan I Tahun 2026			Triwulan II Tahun 2026		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat I	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keberhasilan dalam mencapai target kinerja ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan secara tertib dan tepat waktu dalam hal:

- a. Pengisian dan penyampaian dokumen capaian kinerja pada aplikasi kinerjaku dan aplikasi e-Riviu SAKIP KemenPANRB serta pengisian realisasi kegiatan melalui aplikasi e-monev Bappenas;
- b. Penyampaian Laporan Kinerja/Data Capaian Kinerja (Triwulan);
- c. Pemantauan kepatuhan pelaksanaan pengawasan sesuai PKPT;
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- e. Penyusunan laporan evaluasi rencana aksi.

B. Realisasi Anggaran

Untuk menjalankan pengawasan terhadap mitra kerja, Inspektorat I berdasarkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA_032.02.1.622098/2026 tanggal 1 Desember 2025, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5.891.812.000,00, sampai dengan 30 Juni 2026 telah terdapat blokir anggaran pada Inspektorat I sebanyak dua kali, yaitu:

- 1) Berdasarkan Surat Sekretaris Itjen Nomor 1335/ITJ.0/RC.420/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 terdapat blokir anggaran sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025, pemblokiran yang dilakukan adalah sebagai penguatan dukungan pelaksanaan program prioritas direktif Presiden Tahun 2026, hal ini berdampak terhadap besaran anggaran yang dikelola oleh Inspektorat I Tahun 2026 menjadi sebesar Rp4.768.909.000,00 atau terdapat blokir anggaran sebesar Rp1.122.903.000,00. Dari besaran anggaran efektif yang dikelola akan dipergunakan untuk pelaksanaan pengawasan terhadap Program Prioritas Nasional/Strategis sebesar Rp4.439.698.000,00 dan Pengawasan Program Reformasi Birokrasi pada Mitra Inspektorat I sebesar Rp329.211.000,00.
- 2) Berdasarkan Surat Inspektur V Nomor B.506/ITJ.5/HP.320/IV/2026 tanggal 21 April 2026 yang merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 595/SJ/RC.420/IV/2026, tanggal 14 April 2026 perihal Permohonan Reviu Revisi Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 pada Inspektorat Jenderal KKP, terdapat pemblokiran anggaran kedua sebesar Rp1.253.593.000,00, hal ini berdampak terhadap besaran anggaran yang dikelola oleh Inspektorat I Tahun 2026 menjadi sebesar Rp3.515.316.000,00 yang terdiri dari Program Prioritas Nasional/Strategis Rp2.798.985.000,00, Pengawasan Program Reformasi Birokrasi pada Mitra Inspektorat I sebesar Rp306.411.000,00 dan Pengawasan Tata Kelola/Operasional Unit Kerja/Satker Inspektorat I Rp409.920.000,00

Perkembangan realisasi anggaran sampai dengan Juni 2026 secara akrual sebesar Rp2.570.731.499,00 atau sebesar 73,13%, dengan sisa anggaran sebesar Rp944.584.501,00 atau sebesar 26,87% dari pagu efektif. Adapun rincian realisasi anggaran yaitu terdiri dari belanja bahan sebesar Rp503.619.000,00, belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp2.019.087.499,00 dan perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp48.025.000,00.

C. Capaian Rencana Aksi (Renaksi) Pencapaian Target Kinerja

Inspektorat I telah melakukan monitoring secara berkala terhadap Renaksi pencapaian target kinerja dimana pada periode Triwulan II Tahun 2026 diketahui terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yang dijabarkan kedalam 11 kegiatan pendukung dengan 36 target/output yang harus dicapai. Berdasarkan hasil monitoring diketahui bahwa terhadap 36 target/output telah terealisasi sebanyak 26 target/output atau 72,22%, namun masih terdapat 10 kegiatan pengawasan yang belum terlaksana, yaitu:

- 1) Pengurangan lokasi pada kegiatan Uji Substansi Pemantauan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dari rencana 10 lokasi menjadi 6 lokasi sesuai Nota Dinas Inspektur I kepada Sekretariat Itjen, Nomor 162/ITJ.1/TU.210/VII/2026, tanggal 3 Juli 2026, perihal Perubahan waktu pengawasan dari jadwal PKPT;
- 2) Kegiatan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Maturitas SPIP yang dilaksanakan pada 13-21 Juli dengan Nomor Surat Tugas B.307-309/ITJ.1/KP.440/VII/2026 (3 Kegiatan) dikarenakan adanya sinkronisasi jadwal Penilaian Mandiri yang ditetapkan Biro Keuangan selaku Satgas SPIP KKP, sesuai Nota Dinas Inspektur I kepada Inspektur II, III, IV dan V, Nomor 163/ITJ.1/TU.210/VII/2026, tanggal 6 Juli 2026, perihal Perubahan Jadwal Penjaminan Kualitas SPIP KKP Tahun 2026;
- 3) Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen pada Mitra Inspektorat I SPIP yang dilaksanakan pada 6-10 Juli dengan Nomor Surat Tugas B.313/ITJ.1/KP.440/VII/2026 (3 Kegiatan) dikarenakan adanya perubahan waktu pengawasan dari jadwal PKPT.

Target rencana aksi periode Januari sampai dengan Juni tahun 2026 sebanyak 62 kegiatan, sehingga capaian pelaksanaan rencana aksi selama periode Januari - Juni Tahun 2026 sebanyak 52 kegiatan dari 62 kegiatan (capaian rencana aksi sebesar 83,87%).

D. Kendala/Permasalahan dan Saran

Tidak terdapat kendala/permasalahan dalam mencapai target kinerja periode Januari sampai dengan Juni tahun 2026, hal ini terlihat dari capaian kinerja yang melebihi dari

target yang telah ditetapkan, meskipun mengalami penurunan secara Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dari periode sama tahun 2025 yaitu 113,85% menurun menjadi 109,69% yang disebabkan peningkatan target di setiap IKU.

BAB IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan II Tahun 2026, Inspektorat I memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 109,69% atau dengan kategori “Baik”, nilai kinerja ini diperoleh melalui pengukuran terhadap 5 (lima) indikator kinerja dengan hasil pengukuran adalah 4 (empat) indikator kinerja mendapatkan nilai yang melebihi dari target kinerja dan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan komitmen Inspektorat I untuk selalu mencapai target yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja dengan melakukan monitoring secara periodik, baik secara tatap muka maupun secara tertulis dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Inspektorat I selalu berupaya melakukan perbaikan dengan melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan pengawasan salah satunya melalui penggunaan teknologi informasi dalam membantu proses pengawasan dan pemantauan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. Selain hal tersebut, Inspektorat I juga meningkatkan peran sebagai *consulting partner* dalam rangka mendeteksi awal adanya hambatan/penyimpangan pelaksanaan program/kegiatan mitra kerja, serta pelaksanaan pengawasan yang bersifat non PKPT dalam rangka memberikan pengawalan/pendampingan terhadap program/kegiatan mitra.

BAB V. LAMPIRAN

Capaian kinerja yang merupakan hasil dari pengukuran kinerja tidak terlepas dari bukti dukung yang telah dikumpulkan untuk memperkuat capaian pada masing-masing indikator kinerja, adapun bukti dukung dimaksud disampaikan sebagai lampiran pada laporan kinerja ini sebagai berikut (bukti dukung dapat diunduh melalui laman: <https://bit.ly/3QRz5tW>):

1. Perjanjian Kinerja Inspektur I;
2. Nota Dinas Inspektur I kepada Sekretaris Itjen, Nomor 167/ITJ.1/HP.510/VII/2026, tanggal 8 Juli 2026, perihal Hasil Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2026 pada Mitra Inspektorat I;
3. Nota Dinas Inspektur IV kepada Inspektur I, Nomor 154/ITJ.4/TU.210/VII/2026, tanggal 3 Juli 2026, perihal Hasil Telaah Sejawat Internal terhadap Inspektorat I;

4. Nota Dinas Ketua Tim Kerja Sistem Informasi Pengawasan kepada Sekretaris Itjen, Nomor 917/ITJ.0/HM.540/VII/2026, tanggal 7 Juli 2026, perihal Capaian IKU Persentase Implementasi dan Fasilitasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2026;
5. Nota Dinas Inspektur I kepada Sekretaris Itjen, Nomor 168/ITJ.1/HP.470/VII/2026 tanggal 11 Juli 2026 perihal Penyampaian Evaluasi Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Inspektorat I Periode Triwulan II Tahun 2026;
6. Nota Dinas terkait Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (12 Nota Dinas)
7. Tangkap layar pengisian kinerja Triwulan II pada aplikasi kinerjaku;
8. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan periode Triwulan II (April-Juni) Tahun 2026;
9. Matrik kepatuhan pelaksanaan PKPT periode Januari-Juni Tahun 2026.